

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbatasan merupakan aspek penting negara karena menentukan wilayah otoritas dan kedaulatan negara yang bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang sangat strategis bagi suatu negara, karena menyangkut dengan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan UU No 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, menyatakan kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dan kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pada UU wilayah negara juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Indonesia menjadi tanggung jawab negara.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni, Australia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, India, dan Palau. Diantara 10 negara tersebut, ada tiga negara yang berbatasan langsung melalui daratan yakni dengan Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste.¹ Kawasan perbatasan yang berada terluar pada wilayah Indonesia hingga sekarang masih menjadi kawasan yang rawan akan konflik antar-negara. Kondisi masyarakat pada kawasan perbatasan negara hingga saat ini masih belum dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana masyarakat Indonesia yang berada di wilayah lainnya.

Masyarakat kawasan perbatasan masih memerlukan perhatian yang serius dalam membangun dan mengembangkan potensi di wilayah perbatasan baik dari

¹ Departemen Komunikasi dan Informatika. 2006. *Menelusuri Batas Nusantara: Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi. Hlm 5.

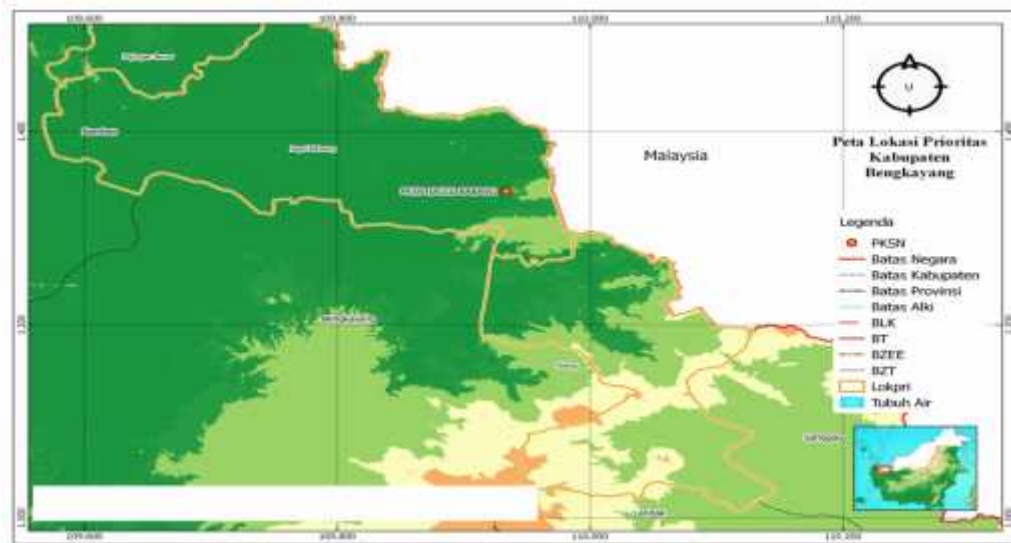
segi ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan guna lebih memperkuat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan di kawasan perbatasan masih menjadi hal yang belum dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah, sehingga permasalahan pemerataan pembangunan, pendistribusian barang dan pelayanan publik di wilayah perbatasan masih sulit untuk di akses oleh masyarakat kawasan perbatasan.

Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa lokasi kawasan perbatasan negara yang berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan. Keterbatasan infrastruktur yaitu transportasi, energi listrik, dan sarana prasana (sarpras) komunikasi dan informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan.² Akses infrastruktur dan pelayanan dasar sosial di kawasan perbatasan masih banyak yang perlu dibangun, dikembangkan, perawatan dan pemerataan. Saat ini beberapa pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki kualitas belum layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan. Minimnya pembangunan kawasan perbatasan disebabkan keterbatasannya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar.

Salah satu kawasan perbatasan yang masih mengalami keterbatasan adalah kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang memiliki dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kecamatan Siding dan Kecamatan Jagoibabang.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan. Hal 8-19.

Gambar 1. Peta Kabupaten Bengkayang



Sumber : Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, BAPPENAS, 2016.

Kabupaten Bengkayang memiliki batas wilayah dengan:

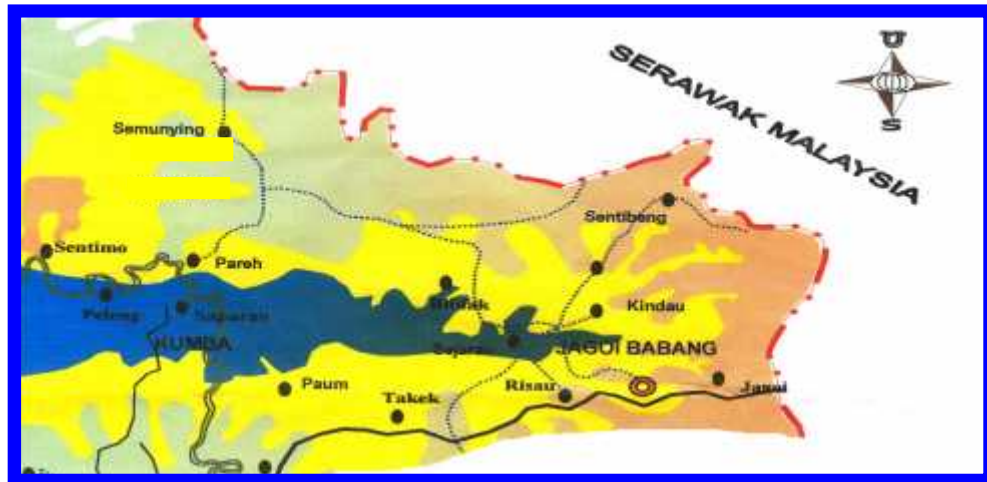
- a. Seblah Utara : Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pontianak
- c. Sebelah Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di salah satu kecamatan untuk memahami permasalahan pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang. Observasi hanya mampu dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang karena untuk mengakses ke Kecamatan Siding masih sulit dan terisolir. Kecamatan Jagoi Babang sebagai salah satu kawasan perbatasan masih memiliki pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar sosial yang belum layak. Kondisi pembangunan serba minim sangat memungkinkan warga masyarakat perbatasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya ke Serawak Malaysia. Saat ini permasalahan yang terdapat di Kecamatan Jagoi Babang sangat krusial di beberapa aspek yaitu seperti demografi, ekonomi, infrastruktur dasar, dan lingkungan.³ Pelaksanaan pembangunan di kawasan

³ Tim Kecamatan Jagoi Babang 2013, *Profil Kecamatan Jagoi Babang 2014*, Hlm 6.

perbatasan masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan.

Gambar 2. Peta Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang⁴



Sumber : Profil Kecamatan Jagoibabang 2014.

Kecamatan Jagoibabang berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kec. Sajingan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Siding
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Seluas
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : (Sarawak) Malaysia

Jumlah penduduk Kecamatan Jagoibabang yang berkisar 6948 jiwa dan memiliki penduduk miskin 2.900 jiwa, atau sebesar 44,63% penduduk miskin yang terdata.⁵ Faktor penyebab terjadinya kemiskinan penduduk tersebut karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi pemicu kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jagoibabang. Namun, permasalahan tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga terjadi karena faktor keterbatasan pembangunan infrastruktur yang berupa jalan, jembatan, listrik, air bersih dan bahkan telekomunikasi yang membuat

⁴ Tim Kecamatan Jagoi Babang 2013, *Profil Kecamatan Jagoi Babang 2014*, Hlm 3.

⁵ *Ibid*

masyarakat semakin mengalami hambatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keterbelakangan tersebut terjadi karena kondisi jalan yang masih belum merata dibangun dengan material aspal dan masih banyak jalan hanya berupa tanah merah. Hal ini membuat masyarakat yang berada di desa yang langsung berbatasan dengan Malaysia sulit untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi seperti ini terlihat jelas pada Desa Jagoi, Kecamatan Jagoibabang yang terletak di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kampung Serikin, Serawak Malaysia. Desa Jagoi memiliki empat jembatan yang hanya dibangun dari susunan kayu dan disatukan dengan rantai besi. Jembatan ini dilewati oleh bus dan truk yang harus bergantian bila harus melewati jembatan tersebut, hal ini dikarenakan jembatan tersebut tidak mampu dilewati lebih dari satu kendaraan.

Ketersediaan transportasi masyarakat Desa Jagoi untuk menempuh perjalanan dari rumah ke kecamatan dan berbagai akses pelayanan lainnya masih minim. Transportasi umum berupa bus Damri dari pemerintah yang beroperasi dari Desa Jagoi menuju pusat kota di Kabupaten Bengkayang. Namun hanya memiliki satu unit bus dan satu kali beroperasi dalam satu hari. Ketersediaan bus Damri yang seharusnya dapat membantu masyarakat kawasan perbatasan menuju pusat kota kabupaten belum dapat dilakukan penambahan. Dengan infrastruktur yang masih terbatas, membuat masyarakat sulit menggunakan alat transportasi untuk melakukan transaksi perdagangan antar wilayah maupun antar negara.

Pembangunan jalan dan ketersediaan transportasi yang minim tidak hanya menghambat transaksi perdagangan tetapi juga menghambat masyarakat Desa Jagoi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jarak tempuh dari

Desa Jagoi dengan SMP dan SMA yang tersedia di Kecamatan Jagoibabang harus memakan waktu dua sampai tiga jam, bila ditempuh dengan berjalan kaki. Hal ini karena bus Damri beroperasi pada pukul 07.00 atau 08.00 pagi. Sekolah dasar (SD) yang tersedia tidak memiliki fasilitas yang layak, bangunan sekolah dengan jumlah kelas yang sedikit tidak sesuai dengan jumlah murid yang dimiliki. Sehingga mengharuskan beberapa SD menjadikan satu ruangan untuk dua kelas. Pembangunan sekolah yang masih dibawah standar dan kualitas tenaga pengajar yang bukan merupakan tenaga profesional semakin membuat keadaan pelayanan dasar pendidikan semakin buruk.⁶ Akibatnya, keterbatasan kualitas dan pelayanan pendidikan ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Jagoibabang.

Kualitas jalan dan transportasi yang minim tidak hanya menghambat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, akan tetapi juga menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di kecamatan. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat Jagoibabang hanya puskesmas kecamatan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Puskesmas kecamatan hanya memiliki satu dokter dengan jumlah penduduk kecamatan 6.948 jiwa. Jarak tempuh yang diperlukan berkisar 45 menit dari Desa Jagoi, bila menggunakan kendaraan, tetapi puskesmas Jagoibabang belum memiliki mobil ambulans. Akibatnya, jika pasien puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit dapat memakan waktu 4-5 jam untuk mencapai rumah sakit di ibukota Kabupaten Bengkayang.⁷

Pembangunan infrastruktur untuk ketersediaan listrik juga masih mengalami keterbatasan karena hampir setiap hari masyarakat Desa Jagoi harus mengalami pemadaman 10-16 jam. Pemadaman terjadi karena keterbatasan daya

⁶ Hasil observasi di Kecamatan Jagoi Babang pada tanggal 2 Agustus 2015.

⁷ *Ibid*

listrik yang tersedia untuk Kecamatan Jagoibabang dan tidak sesuai dengan jumlah penggunaan. Beberapa rumah masyarakat di Desa Jagoi menggunakan listrik tenaga surya untuk mendapatkan aliran listrik tambahan sebelum pukul 18.00 – 05.00 WIB. Ketersedian jaringan telekomunikasi masih terbatas, hanya di beberapa titik kecamatan saja jaringan dapat diakses. Apabila sudah berada di Desa Jagoi maka jaringan telekomunikasi akan sulit untuk didapatkan.⁸ Keterbatasan jaringan listrik dan telekomunikasi yang terjadi di kawasan perbatasan Jagoibabang sangat menghambat aktifitas masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menghambat kegiatan petugas imigrasi dan pos penjagaan dalam melakukan pendataan.

Kawasan perbatasan Desa Jagoi juga mengalami keterbatasan air bersih. Sarana air bersih yang dimiliki Kecamatan Jagoibabang hanya mampu melayani sekitar 2000 KK dan bukan disediakan oleh PDAM, melainkan dari pengeboran mata air yang dilakukan masyarakat. Air sungai yang ada belum dapat dialirkan ke rumah warga karena PDAM yang telah dibangun tidak beroperasi. Ketersediaan air bersih baru bisa didapatkan jika dipompa dengan menggunakan aliran listrik.⁹

Keterbatasan sarana prasarana infrastruktur dan pelayanan dasar tersebut mengharuskan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan fasilitas pelayanan yang terdapat di Serawak, Malaysia. Keterbatasan pembangunan ini juga membuat masyarakat perbatasan merasa diabaikan bahkan dilupakan oleh pemerintah. Maka, dibutuhkan kehadiran negara dalam mempercepat

⁸ *Ibid*

⁹ Hasil observasi di Kecamatan Jagoi Babang pada tanggal 2 Agustus 2015.

pembangunan di kawasan perbatasan agar tidak berdampak pada nilai-nilai nasionalisme dan pertahanan kedaulatan negara.

Permasalahan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berdasarkan dari hasil observasi peneliti, namun juga dari beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Puslitbang Kesos¹⁰ yang dilaksanakan di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang 2012, menyatakan bahwa sumber-sumber pelayanan masyarakat yang bisa diakses penduduk umumnya masih sangat terbatas; kemampuan yang bisa diakses penduduk untuk mengelola sumber daya pertanian dan perkebunan belum memadai; sehingga sumber daya ini belum mampu didayagunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya hasil dari penelitian Dendy Kurniadi¹¹ di Kabupaten Sanggau tahun 2009, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peluang dalam pengembangan kawasan perbatasan karena kawasan perbatasan, memiliki elemen kerangka kerja instansi, ketertarikan sektor swasta, pendekatan infrastruktur, kebijakan dan investasi. Namun, masih terdapat kendala yaitu dari prespektif ekonomi, dimana peran kebijakan dan infrastruktur yang belum mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Berdasarkan seluruh permasalahan yang diatas, maka pemerintah memerlukan suatu kebijakan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan di kawasan perbatasan. Kebijakan yang diperlukan ini berupa program atau kegiatan dalam mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Berdasarkan pendapat

¹⁰ Sutaat, 2012, Jurnal Sosiokonsepsia Vol. 17, No. 01 2012 : *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara; Studi Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang – Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosail, Kementerian Sosial.

¹¹ Kurniadi, Dendi, 2009, *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, TESIS, Semarang: Universitas Diponogoro.

pakar ahli kebijakan bangsa Inggris, Brian W Hogwood dan Lewis A. Gunn menyatakan bahwa “*Policy as programme*” atau kebijakan sebagai program.¹² Pernyataan kedua analisis ini dimaksudkan bahwa kebijakan merupakan beberapa program yang mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan legislasi. Program atau kegiatan yang dibentuk dalam kebijakan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan untuk permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia, telah disusun dalam RPJMN 2015–2019 bahwa pembangunan kawasan perbatasan: (i) pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*); (ii) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (iii) pendekatan lingkungan.¹³ Pendekatan pembangunan ini bertujuan agar pembangunan nasional dapat mensejahterakan masyarakat kawasan perbatasan yang menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan dengan kedua pendekatan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.¹⁴

Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan diatas juga telah didukung dengan dibentuknya badan pengelola perbatasan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

¹² Solichin Abdul Wahab, 2011, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Malang: UMM Press. Hlm – 16.

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan. Hlm 6-26.

¹⁴ *Ibid.*, 6-27

(BNPP) menyatakan bahwa, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.¹⁵ Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, untuk pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP.¹⁶

Kemudian didukung dengan kebijakan tentang pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 13 tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah Pasal 119 menyatakan bahwa penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Bengkayang. Bupati Kabupaten Bengkayang memberikan tanggung jawab kepada BPP untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dari kebijakan yang ditetapkan.¹⁷

Melihat dari kebijakan yang telah dibentuk untuk mengatasi permasalahan kawasan perbatasan, maka orientasi pembangunan tidak hanya bersifat *inward looking*, tetapi menjadi *outward looking*. Kawasan perbatasan

¹⁵ Pepres No 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pasal 3.

¹⁶ Pepres No 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pasal 3.

¹⁷ Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 118.

tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan (*security*) yaitu sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik, tetapi juga berorientasi pada pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan.

Penetapan kebijakan dalam RPJMN, peraturan presiden dan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara merata. Namun, hingga tahun 2015 melihat berdasarkan hasil observasi peneliti di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang, pembangunan masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah pusat ibukota kabupaten. Maka *problem statement* yang muncul adalah perlunya penelitian untuk mengetahui sejauh mana kebijakan atau program Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengenai pembangunan kawasan perbatasan yang terlaksana di Kecamatan Jagoibabang.

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2015, kendala dan kewenangan pemerintah yang ada sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

B. Permasalahan Penelitian

Uraian masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah yang ada, maka pertanyaan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi program pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang.
2. Untuk Mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan perbatasan di Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan kajian teori tentang otonomi daerah, kebijakan dan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat kawasan perbatasan di Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mengelola pelayanan publik masyarakat perbatasan, khususnya kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang dan kawasan perbatasan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

E. Definisi Konsep

1. Kawasan Perbatasan

Menurut pengertian berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara kawasan perbatasan (*Frontier Areas*) adalah bagian dari wilayah perbatasan negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang garis wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah negara di darat, “Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan”.¹⁸ Serta melalui UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penejelasan ini

¹⁸ Pasal 1 Angka 10.

bukan berarti pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pendekatan hankam.

Batas adalah geografi dari batas bangsa yang mendefinisikan yurisdiksi hukum.¹⁹ Batas negara mendefinisikan kedaulatan nasional dan hak terhadap warga negara. Kedaulatan Negara didefinisikan sebagai “Kepemilikan dari otoritas pengambil keputusan tunggal dalam mendefinisikan satu kebijakan”.²⁰ Pendekatan kesejahteraan bersama-sama dengan pendekatan hankam dan lingkungan menjadi strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin kedaulatan wilayah NKRI.²¹

Dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. PP No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dimana kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar).

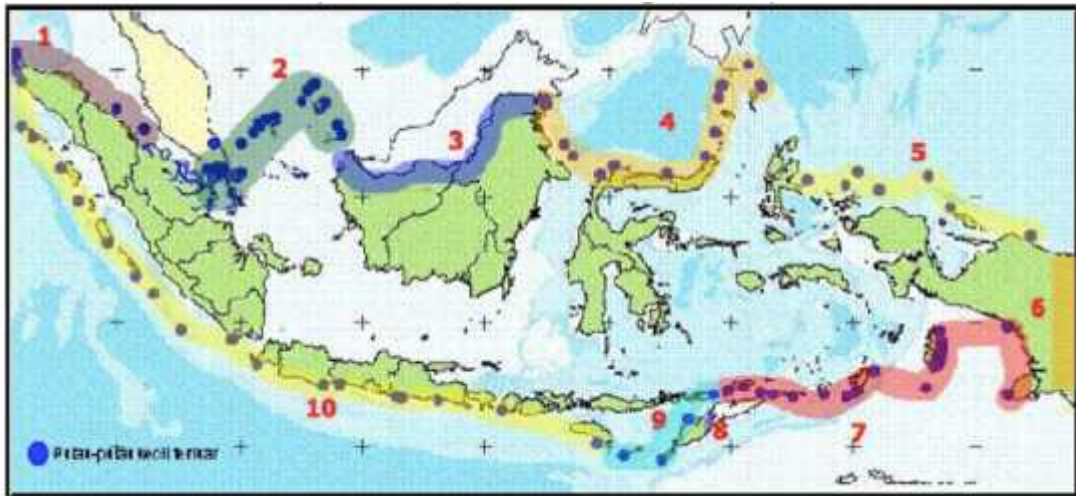
¹⁹ Badan Pengelolaan Perbatasan Negara, Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kawasan Strategis Nasional 2013, Jakarta: BNPP. Hlm 2-23.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Hlm-24

Gambar 3. Sebaran Kawasan Perbatasan di Indonesia

(PP No. 26/2008 tentang RTRWN)



Sumber: BAPPENAS, 2011.

Penjelasan Kawasan Perbatasan sebagai berikut:

1. Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD/Sumut), 2 Pulau Kecil Terluar.
2. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), 20 Pulau Kecil Terluar.
3. Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara)
4. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Kaltara, Sulteng dan Sulut), 18 Pulau Kecil Terluar.
5. Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), 8 Pulau Kecil Terluar.
6. Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua).
7. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), 20 Pulau Kecil Terluar.
8. Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)
9. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), 5 Pulau Kecil Terluar.
10. Kawasan Perbatasan Laut berhadapan dengan Laut Lepas, 19 Pulau Kecil Terluar.

Negara kepulauan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh negara). Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia; (2) Papua New Guinea ; dan (3) Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu: (1) India, (2) Malaysia, (3) Singapura, (4) Thailand, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7) Republik Palau, (8)

Australia, (9) Timor Leste dan (10) Papua Nugini. Perbatasan laut ditandai oleh keberadaan 92 pulau-pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah.

2. Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan. Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini berubah orientasinya, dari “*inward looking*” menjadi “*outward looking*” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal ini karena perbatasan negara tidak hanya menjadi wilayah pertahanan, namun juga menjadi wilayah yang penduduknya perlu dilindungi secara utuh dengan memberikan kesejahteraan.

Paradigma *inward looking*, melihat perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik (*security approach*), sementara paradigma *outward looking* memandang NKRI sebagai satu entitas yang memiliki elemen kedaulatan, wilayah penduduk yang harus dilindungi secara utuh. Bahwasanya perbatasan negara disamping sebagai wilayah pertahanan, juga memiliki sumber daya yang harus dipergunakan secara ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pendekatan kesejahteraan dilaksanakan tidak meninggalkan esensi dari pendekatan keamanan dalam rangka ancaman global.

Pendekatan kesejahteraan mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang

berhubungan dengan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan merupakan prioritas untuk dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dalam pandangan pendekatan kesejahteraan, pembangunan sosial ekonomi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kedamaian masyarakat.²²

Berdasarkan penjelasan atas UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Maka dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, paradigma yang dapat digunakan adalah paradigma pembangunan perbatasan.

Beralihnya pandangan terhadap kawasan perbatasan ke paradigma pembangunan perbatasan, maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah

²² Kolonel Inf . Dody Usodo Hargo.S,S.Ip. Asisten Operasi Kasdam VI/Tanjungpura; *"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara"*. Website Resmi KODAM VI/MULAWARMAN (<http://www.kodammulawarman.mil.id/info/opini/169-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia-diwilayah-perbatasan-kalimantan>). Diakses pada 22 Agustus 2016.

Negara dan Kawasan Perbatasan.²³ BNPP yang terdiri dari beberapa deputi yang memiliki tugas untuk mengelola kawasan perbatasan, salah satunya adalah deputi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Tugas inti dari deputi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ini adalah: 1) melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan; 2) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3) mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 4) melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.²⁴ Dengan tugas yang dimiliki BNPP dalam Peraturan Presiden No 12 tahun 2010 tersebut maka pembangunan di kawasan perbatasan merupakan kebijakan untuk mempercepat pembangun kawasan perbatasan yang dapat menciptakan kesejahteraan, keadilan dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan diperkuat dalam RPJMN 2015 - 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yang telah menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga program-program yang dilaksanakan ada keterkaitan erat dengan misi pembangunan, untuk dapat

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pasal 3.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 11.

mewujudkan keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan/keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Arah kebijakan program yang dilaksanakan bergeser dari orientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*", sehingga bentang kawasan perbatasan dapat dijadikan suatu potensi pengembangan aktifitas ekonomi yang terbuka dengan Negara tetangga, melalui kegiatan perdagangan timbal balik (*reciprocal*).²⁵ Pergeseran orientasi ini mengakibatkan pendekatan pembangunan harus lebih menonjolkan aspek penciptaan kesejahteraan (*prosperity*), yang diimbangi secara proporsional dengan aspek pertahanan/keamanan (*security*) dan lingkungan.²⁶

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta dari Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi.²⁷ Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan

²⁵ Website : Universitas Gajah Mada. Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara. <http://www.ugm.ac.id/id/berita/7880posisi.kelembagaan.kendala.dalam.mengelola.perbatasan.an.negara> diakses pada, 20 April 2016. Pukul 23.00 WIB.

²⁶ WILAYAH PERBATASAN.COM, Grand Design Pengelolaan Perbatasan 2010 - 2025, <http://www.wilayahperbatasan.com/grand-design-pengelolaan-perbatasan-2010-2025/>, Di Akses pada, 20 April 2016. Pukul 23.00 WIB.

²⁷ http://www.bappenas.go.id/files/3313/6082/9889/bab-33_20090202204616_1756_34.pdf diakses 7 April 2016. Pukul 16.00 WIB.

infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Dalam hal ini pembangunan infrastruktur dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian berlanjut untuk mendistribusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.

4. Pembangunan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan salah satu jenis pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Menurut UU No 23 tahun 2014 Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Hal ini berkaitan juga dengan UUD 1945 dimana negara diwajibkan untuk melayani setiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pelayanan dasar yang dilakukan secara efektif dapat memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, meningkatkan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menguatkan kepercayaan pada pemerintahan desa.

Pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar. Dalam hal ini pelayanan dasar menjadi urusan wajib pemerintah, yang dimana pelayanan dasar tersebut berupa: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.²⁸ Sedangkan dalam RPJMN 2015-2019 paket pelayanan dasar yang akan ditingkatkan untuk masyarakat miskin dan rentan berupa: identitas hukum; pendidikan; kesehatan; dan sosial. Dari seluruh pelayanan dasar tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimum), yang dimana ditetapkan sebagai tolok ukur untuk kinerja pelayanan.

Dalam RPJMN 2015-2019 paket pelayanan dasar pendidikan adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan; 2) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; 3) Pengembangan Kelas Calistung (baca, tulis, dan menghitung) di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan dengan penyediaan sekolah kecil, sekolah kecil terintegrasi dan penyediaan guru kunjung melalui proses kerjasama dengan lembaga keagamaan; 4) Pemerataan distribusi tenaga pendidik khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; 5) Peningkatan program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T), khususnya untuk penempatan di Provinsi Papua dan Papua Barat; 6) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; 7) Pemberian tunjangan khusus bagi guru di bagian

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 11 ayat (2).

pegunungan tengah dan perbatasan negara; dan 8) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama di daerah terisolir dan perbatasan.²⁹

Sedangkan untuk paket pelayanan dasar kesehatan adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; 2) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan kesehatan; 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak); 4) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama terutama di kawasan perbatasan; 5) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; 6) Pengembangan telemedis khususnya di wilayah terisolir dan kawasan perbatasan; dan 7) Pengembangan obat-obat tradisional sebagai alternatif pengobatan sesuai dengan budaya dan potensi lokal.³⁰

5. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Strategi untuk arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dalam peraturan BNPP No. 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2015-2019 meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur transportasi darat mengacu pada strategi No. 3 RPJMN 2015-2019, yakni “Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan. Hlm 2-29.

³⁰ *Ibid.*, 2-30.

provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: a) Menyusun kebijakan yang mendorong percepatan jaringan jalan dan jaringan transportasi; b) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan simpul transportasi darat; dan c) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan jaringan transportasi darat.

Selain itu, juga didasarkan pada strategi No. 4 RPJMN 2015-2019 yaitu “membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai dan udara dengan jalan/moda. dermaga non status dan pelayanan keperintisan”, yang dijabarkan ke dalam strategi-strategi: a) Mempercepat pembangunan jaringan jalan terutama jalan paralel, jalan poros, dan jalan non status; dan b) Membangun/meningkatkan moda transportasi darat.

b. Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar permukiman mengacu pada strategi No.1 RPJMN 2015-2019, yakni “pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi- informasi”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: a) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air; b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat; dan c) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan.

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar permukiman juga mengacu pada strategi No. 5 RPJMN 2015-2019, yakni “membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: a) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; dan b) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi.

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan mengacu pada strategi No. 2 RPJMN 2015-2019, yakni “membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi- strategi turunan sebagai berikut: a) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; b) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; c) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar; d) Mengembangkan keahlian dan keterampilan SDM sesuai kompetensi lokal; e) Mengembangkan pendidikan keperawatan; dan f) Memperkuat karakter bangsa dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

F. Definisi Operasional

1. Peran BNPP dalam Implementasi Kebijakan

1.1. Komunikasi

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - a) RPJMN 2015-2019
 - b) Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019
 - c) Rencana Aksi 2015
- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - a) BNPP dan Kementerian/Lembaga (K/L)
 - b) Pemerintah Pusat (BNPP) dan Pemerintah Daerah (BPP dan SKPD)
- c. Pengawasan

Pengawasan BNPP dan BPP dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh K/L dan SKPD.
- d. Evaluasi

Mengenai laporan dan tanggung jawab K/L atas capaian target dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

1.2. Disposisi

- a. Komitmen dalam pencapaian Pelaksanaan Program Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Telekomunikasi) Renaksi 2015
- b. Komitmen dalam pencapaian Pelaksanaan Program Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) Renaksi 2015

2. Kendala-kendala

- a. Anggaran
- b. Kebijakan
- c. Birokrasi / Pemerintah Daerah

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perbatasan Jagoibabang.

Menurut Nasution metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian.³¹ Akan tetapi tidak semua ahli metodologi penelitian menyatakan demikian. Menurut Surakhmad, penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Mely G. Tan mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.³² Sedangkan menurut, metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok: (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. (2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.³³

³¹ Dalam Abdurrahman, H & Soejono. 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 19.

³² *Ibid.*, Hlm 22.

³³ Nawawi, Hadari. 1983, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 64.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari kebijakan Rencana Aksi (Renaksi) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Sumber Data

Pengertian sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek atau unit penelitian sebagai sumber data yang dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.³⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kab. Bengkayang, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Bengkayang, Kepala Kecamatan Jagoi Babang, Kepala Kecamatan Siding, dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan

³⁴ Sugiyono, Dr., Prof., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hlm 225.

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.³⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.³⁷ Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas.³⁸

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mencari informasi mengenai kawasan perbatasan Jagoibabang, dengan melakukan survei lokasi yang dilakukan sebelum melalui penelitian.

³⁵ *Ibid* 225.

³⁶ *Ibid* 239.

³⁷ Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta. Hlm 25.

³⁸ *Ibid*.

b. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan melakukan perekaman suara pada saat perbincangan dengan informan, perekaman tersebut dilakukan agar tidak kehilangan data dari informan.³⁹

Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui rencana strategi pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam RPJMN 2015-2019 di Kawasan Perbatasan, serta wawancara tersebut dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kalimantan Barat, BPP Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Jagoi Babang beserta instansi berwenang lainnya yang mengetahui lebih jelas mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan, pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan teori dengan realitas.

³⁹ Sulistyio-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Hlm 173.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰

5. Subyek Penelitian

- a. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, BAPPENAS.
- b. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP
- c. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang.
- e. BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

6. Lokasi Penelitian : Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

7. Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

⁴⁰ Sugiyono, Dr., Prof., 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Hlm 240.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 246.

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya.⁴² Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

⁴² *Ibid.*, hlm 247.